



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya jua maka buku Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 Revisi ini dapat disusun dengan baik

Subtansi dari Rencana Strategis ini sudah barang tentu tidak terlepas dari acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang telah mengacu pada Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota serta mengakomodir isu-isu aktual sektoral sehingga dapat mewujudkan visi Provinsi Jambi **“Tertib Unggul Nyaman Tangguh Adil Sejahtera (TUNTAS) 2021”**

Selain mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi tersebut telah pula dicoba memperhatikan parameter-parameter strategis yang mempengaruhi kinerja institusi, dan dengan melakukan analisis sesuai dengan pedoman yang berlaku, maka diharapkan langkah-langkah strategis yang konkrit dan dapat diimplementasikan dan dapat diformulasikan di dalam Rencana Strategis ini.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam proses penyusunan RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 ini.

Dengan tersusunnya perencanaan jangka menengah ini kiranya dapat menjadi acuan untuk perencanaan jangka pendek dan menjadi landasan perencanaan operasional oleh unit-unit di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi serta menjadi sumber-sumber ukuran indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Kehutanan.



Akhir kata, semoga buku Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat memberi manfaat dan menjadi pedoman bagi kita semua seperti yang kita harapkan.

Jambi, 2021
KEPALA DINAS,

Akhmad Bestari,SH,MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740508199903 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN		
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	5
1.3.	Maksud dan Tujuan	8
1.4.	Sistmatika Penulisan	8
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN		
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2.	Sumber Daya	20
2.3.	Kinerja Pelayanan	21
2.4.	Tantangan Pengembangan Layanan Dinas Kehutanan	30
BAB III: ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI		
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	31
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	32
3.3.	Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	39
3.4.	Penentuan isu-isu Strategis Hidup dan Kehutanan	40
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN		
4.1.	Misi Dinas Kehutanan	45
4.2.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD	46



4.3.	Strategi	49
4.4.	Arah Kebijakan	50
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN			
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN			
DAN PENDANAAN INDIKATIF			
			55
BAB VI: INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU			
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD			
			73
BAB VII: PENUTUP			
			75



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Provinsi Jambi yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya dan kehidupan beragama, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, ketentraman dan ketertiban hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, namun masih banyak pula tantangan dan masalah yang dihadapi dan merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, untuk itu perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kinerja dari suatu instansi memang perlu dievaluasi dengan menggunakan instrumen-instrumen yang obyektif dan terukur, agar dapat diketahui sejauh mana prestasi yang telah dicapai oleh instansi tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terkait dengan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2016 – 2021 termasuk dalam Misi 5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tercantum dalam Program Jambi Tuntas 2021 melalui Program : Perlindungan dan Konservasi SDA, Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Perencanaan dan Pengembangan



Hutan, Perlindungan dan Konservasi SDH dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Sedangkan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 dari Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan bidang Kehutanan adalah memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermanfaat dan terpercaya dengan sasaran penurunan frekuensi dan luasan penebangan liar, Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dengan sasaran kegiatan meningkatkan tata kelola hutan sebagai penghasil pendapatan baik secara langsung (pemanfaatan kayu) maupun tidak langsung (Jasa lingkungan) dan Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan sasaran kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, isu perubahan iklim dan kebencanaan.

Dengan adanya undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan kewenangan kehutanan terbagi menjadi kewenangan pusat dan daerah provinsi, sehingga untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kehutanan di tingkat tapak dilimpahkan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2017 tentang Pembentukan, Penyusunan organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Bertolak dari beberapa argumen tentang relevansi pemilihan isu strategis yang paling menantang pada pemulihan kompetensi utama instansi Dinas Kehutanan pada sektor kehutanan, maka pemerintahan yang baik harus diwujudkan sebagai stimulan dalam membenahan pengelolaan hutan di Provinsi Jambi. Namun demikian sangat disadari bahwa pencapaian penertiban / membenahan pengelolaan hutan yang dijiwai oleh isu strategis, pemerintahan yang baik menjadi keniscayaan



yang sangat sulit untuk dicapai atau dilaksanakan, tetapi langkah-langkah untuk memulainya harus diyakini akan menuju kearah tersebut.

Dalam merunut dan memformulasikan masalah-masalah pengelolaan hutan, maka dalam penulisan ini digunakan alat (tools) dan metode analisis kebijakan dalam merumuskan masalah. Selanjutnya akan digunakan penerapan pengetahuan tentang penyusunan Perencanaan Strategis (Strategic Plan) guna merumuskan kemampuan dan lingkungan strategis (internal maupun eksternal), yang dirumuskan berdasarkan suatu visi dan misi yang realistis serta mampu mengakomodir visi dan misi dari Kementerian Kehutanan maupun visi dan misi dari Pemerintah Daerah, selanjutnya dapat ditentukan strategi, tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan lebih lanjut atas kebijaksanaan organisasi, yang diuraikan dalam program-program dan kegiatan, memerlukan pertimbangan ketersediaan input (masukan) baik dana maupun sumber daya yang lain yang menjadi bagian dari penetapan indikator kinerja, yang pada akhirnya akan berguna dalam tindak lanjut pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang menjadi bagian dari proses Manajemen Kinerja (Performance Management).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, telah menetapkan arah dan strategi pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada prioritas pembangunan bidang pangan dan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan kelestarian hutan

Dari prespektif pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, pembangunan kehutanan ditujukan guna memberikan dampak pada pemanfaatan sumberdaya hutan untuk pembangunan ekonomi,



Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara bersamaan akan memberikan kontribusi pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung Visi JAMBI TUNTAS Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dan pedoman penyusunan ini :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 - 2033 (Lembar Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembar Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021
19. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penyusunan organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanaan Provinsi Jambi
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Taman Hutan Raya pada Dinas Kehutanaan Provinsi Jambi

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan gambaran dan sebagai acuan untuk mencapai sasaran lima tahun kedepan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2016-2021 Revisi dan mengacu pada Rencana Strategis



Kementerian Kehutanan RI Tahun 2015-2019 serta dalam rangka peningkatan Sumber Daya Alam (SDA). dan sesuai dengan tujuan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu "Mewujudkan wilayah Provinsi Jambi dengan ekonomi maju, aman, adil sejahtera berbasis kelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan dengan mengoptimalkan sumberdaya, pemerataan antar wilayah dan infrastruktur".

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 Revisi adalah memberikan perbaikan dikarenakan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang baru berupa arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh Rimbawan Kehutanan Provinsi Jambi dalam mewujudkan cita-cita dan pembangunan kehutanan sesuai dengan visi - misi dan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan..

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA Revisi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai arahan kebijakan yang strategis pembangunan kehutanan sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021 yang hasil akhirnya guna mendukung dan mewujudkan visi Provinsi Jambi yaitu **JAMBI TUNTAS 2021**.

1.4.Sistematika Penulisan

Didalam penulisan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 ini terdiri dari 7 Bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Misi Dinas Kehutanan
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi
- 4.4. Arah Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

Sumberdaya hutan di masa lalu telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional maupun daerah, yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi sehingga sumber daya hutan cenderung dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhatikan daya dukung yang tersedia. Kenyataan tersebut semakin diperparah oleh pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan di luar kehutanan. Sementara itu terjadi pula eksesi kapasitas industri pengolahan kayu yang melebihi kemampuan ketersediaan bahan baku.

Mengingat kenyataan di atas maka pembangunan kehutanan ke depan harus dapat menjamin keberlanjutan sistem dan fungsi sumber daya hutan dengan memperhatikan saling keterkaitan dan ketergantungan antara sumber daya hutan dengan masyarakat serta bersifat akomodatif dan partisipatif.

Dalam rangka pemanfaatan hutan secara optimal dan lestari serta untuk kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya dengan tidak merubah fungsi pokoknya. Untuk tercapainya tujuan pengelolaan tersebut diperlukan pengelolaan hutan yang profesional, partisipatif dan transparan yang meliputi kepastian kawasan hutan, keseimbangan pengelolaan kawasan hutan dan kepastian penegakan hukum.

Berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 863/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014, telah menetapkan kawasan hutan Provinsi Jambi seluas 2.098.535 Ha atau 42,98 % dari luas wilayah Provinsi Jambi, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Hutan Produksi terbatas 258.285 Ha (5,29 %)
2. Hutan Produksi tetap 963.792 Ha (19,74 %)



3. Hutan Konversi 11.399 Ha (0,23 %)
4. Hutan Lindung 179.588 Ha (3,68 %)
5. Hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam 685.471 Ha (14,03 %),

Pemantapan kawasan hutan merupakan prinsip dasar dalam menyusun rencana makro untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, pemantapan kawasan hutan yang legitimate perlu diwujudkan secara optimal mengingat perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan sampai dengan saat ini terus mengalami berbagai permasalahan yaitu ketidakpastian status hukum kawasan hutan, deforestasi dan degradasi hutan yang terus berlangsung hal ini menyebabkan terjadinya percepatan kerusakan hutan.

Sejalan dengan hal tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan salah satu dari instansi daerah di Provinsi Jambi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor: 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, mengembangkan tugas untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan secara profesional dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kewenangannya.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Nomor: 37 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok :

***Melaksanakan urusan pemerintahan bidang
kehutanan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di
bidang kehutanan***



Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kehutanan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan hutan di Provinsi
- c. Melaksanakan kegiatan Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan
- d. Melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
- e. Melaksanakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Kabupaten/Kota
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- g. Melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas :

- Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan fungsinya.
- Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD KPH dan UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) serta Jabatan Fungsional.



- Melaksanakan koordinasi dengan stake holder terkait dalam rangka mensukseskan program pembangunan Kehutanan’;
- Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan baik dengan instansi daerah maupun pusat;
- Monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi Kehutanan, dan pengelolaan barang milik negara;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Sekretariat mempunyai fungsi :

- Koordinasi rencana program dan anggaran
- Pengelolaan urusan keuangan
- Pengelolaan data dan informasi Kehutanan
- Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, keuangan serta hubungan masyarakat.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Program dan Evaluasi
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan dan Asset

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



3. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan (kecuali Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)) serta pemanfaatan hutan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi:

- Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan /atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi
- Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan, usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;



- Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan non kawasan hutan menjadi kawasan hutan, penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
- Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
- Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi; dan
- Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan terdiri dari :

- Seksi Perencanaan Tata Hutan
- Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
- Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kelola Hutan dan Pengembangan Investasi.



4. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah Kabupaten/Kota sedangkan yang tidak lintas Kabupaten/Kota dikelola oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES; pengawasan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
- Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
- Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (*Appendix*) CITES; dan
- Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan



evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.

-

Bidang Pembinaan, Perlindungan dan Ketaatan Hukum terdiri dari :

- Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
- Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- Seksi Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE.

5. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan DAS di Provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; pelaksana kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan yang menjadi asset Pemerintah Provinsi Jambi, dan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan system informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan



- bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi.
 - Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, asset Pemerintah Provinsi Jambi (Taman Hutan Kenali dan Aset lainnya) yang ditugaskan Gubernur.
 - Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus dan pengelolaan Kawasan bernilai Ekosistem Penting dan Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam lainnya selain Wilayah kerja KPH.

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL terdiri dari:

- Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
- Seksi Perbenihan Tanaman Hutan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL.

6. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat :

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan adat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka pengelolaan DAS dan RHL mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan bidang kehutanan.
- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam provinsi
- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan dalam provinsi.
- Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hutan adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi.
- Pelaksanaan pemetaan dan pengukuran areal konflik
- Penyiapan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas daerah kabupaten/kota.
- Penyusunan rencana anggaran penyelesaian konflik
- Pelaksanaan konsultasi ke Kementerian LH dan Kehutanan dalam rangka penyelesaian konflik,
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi konflik di kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam , dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan masyarakat dan Hutan Adat terdiri dari:



- Seksi Penyuluhan Kehutanan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Hutan Adat

7. Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan tugas:

- a. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.
- b. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi

8. UPTD

A. Taman Hutan Raya (TAHURA)

UPTD Taman Hutan Raya Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor: 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Taman Hutan Raya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan tugas Taman Hutan Raya mempunyai fungsi yaitu :

- Pelaksanaan tata hutan pada wilayah Unit TAHURA
- Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan unit TAHURA
- Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit TAHURA



- Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah Unit TAHURA
- Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah unit TAHURA
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah Unit TAHURA
- Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah Unit TAHURA
- Pengembangan, investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit TAHURA
- Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan unit TAHURA
- Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan
- Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah Unit TAHURA dan
- Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi Taman Hutan Raya terdiri dari:

- Kepala UPTD TAHURA
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Perencanaan dan pemanfaatan hutan
- Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Perberdayaan Masyarakat
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Resort



B. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Penyusunan organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP dan KPHL yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, UPTD KPHP menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan tata hutan pada wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan , pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;



- Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan;
- Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesatuan pengelolaan hutan; dan
- Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

Struktur Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah sebagai berikut :

a. Kepala UPTD KPHP

Kepala UPTD KPHP mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPTD KPHP menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kegiatan promosi untuk membuka peluang investasi dalam arealnya;
- Pelaksanaan kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan;
- Pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan;



- Pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan;
- Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan;
- Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
- Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan;
- Penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan aset daerah;
- Pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHP.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan sub bagian tata usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset serta surat menyurat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan manajemen kepegawaian, dan pembinaan tenaga teknis fungsional tertentu dan umum UPTD KPHP;



- Pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan protokoler, surat menyurat, dan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD KPHP;
- Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan dan administrasi perkantoran, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan UPTD KPHP;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian UPTD KPHP;
- Penyusunan standar operasional prosedur, analisis jabatan dan beban kerja UPTD KPHP;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHP.

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi;

- Melakukan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan UPTD KPHP;
- Melakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan penetapan rencana pengelolaan hutan jangka pendek UPTD KPHP;



- Melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Melakukan inventarisasi hutan berbasis blok dan petak secara berkala;
- Melakukan penataan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya;
- Melakukan pengelolaan data base KPHP dan KPHL;
- Menyusun rencana program dan kegiatan UPTD KPHP; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHP.



Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang perlindungan, konservasi sumber daya alam, ekosistem dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanakan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan dan pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai, reklamasi hutan, rehabilitasi lahan dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPHP dan KPHL;
- Pelaksanaan penanganan konflik sosial atau tenurial di wilayah unit KPHP dan KPHL;



- Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial dengan pemangku kepentingan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing-masing.
- Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD KPHP.
- Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Resort

Resort dipimpin oleh seorang Kepala Resort Pengelolaan Hutan yang merupakan jabatan non struktural.

Resort mempunyai tugas membantu kepala UPTD KPHP dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan di tingkat tapak dalam wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Resort menyelenggarakan fungsi:



- Pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan, sarana prasarana kerja dan penindakan hukum di wilayah kerjanya;
- Pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di bidang pembinaan hutan, produksi dan lingkungan;
- Penyelenggaraan tata hutan di wilayah kerjanya yang meliputi tata batas, inventarisasi hutan, penataan blok dan petak, pemetaan dan pengamanan hutan;
- Penyelenggaraan pemanfaatan hutan serta pemantauan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan terhadap personil yang diperbantukan kepadanya sesuai ketentuan;
- Pelaksanaan koordinasi yang harmonis dengan aparat pemda setempat, instansi dan lembaga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

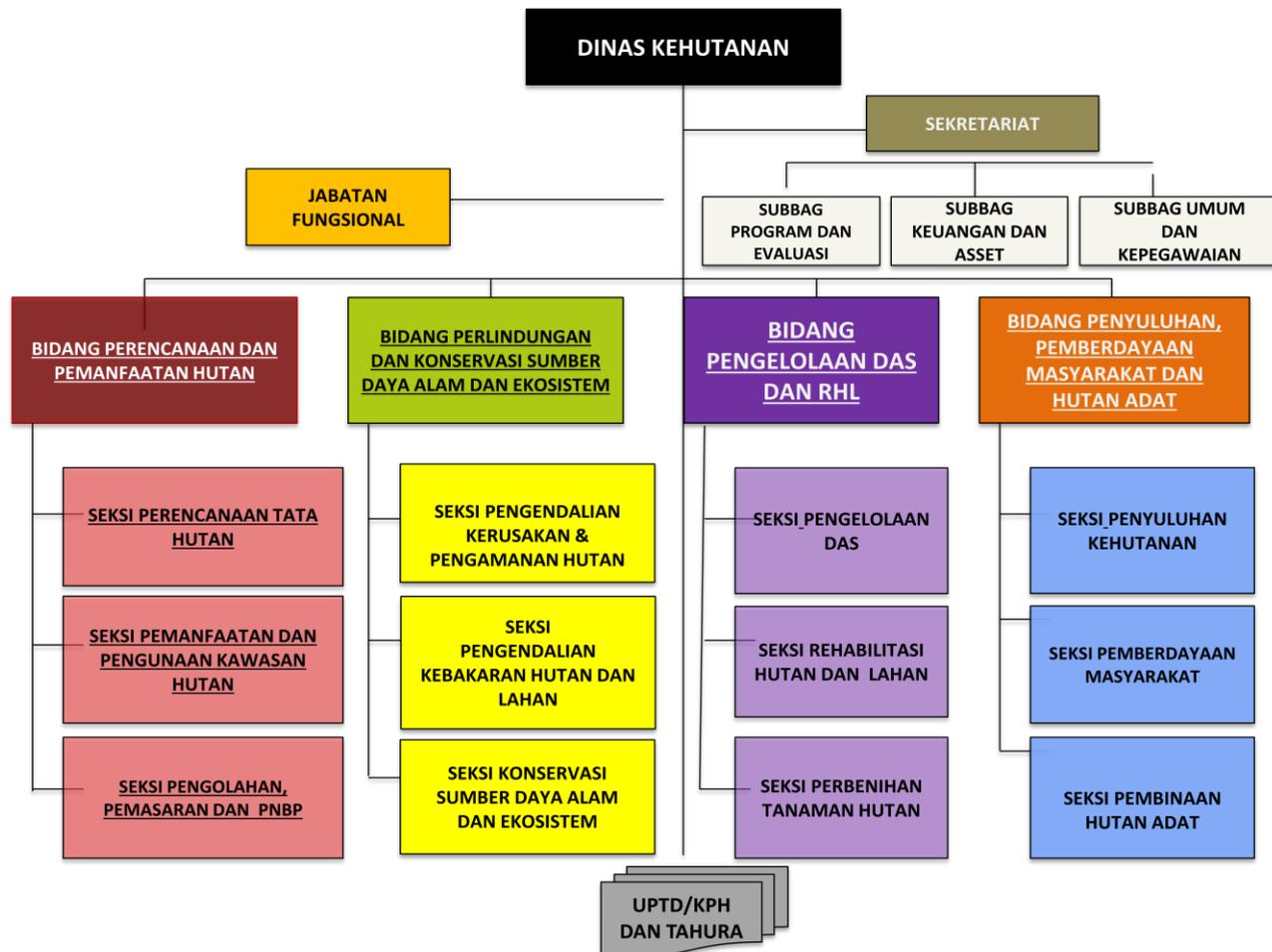
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di bagi menjadi 11 Unit KPHP yaitu :

- KPHP Unit I Kerinci
- KPHP Unit II dan III Bungo
- KPHP Unit IV,V dan VI Merangin
- KPHP Unit VII Hulu Sarolangun
- KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
- KPHP Unit IX Tebo Barat dan KPHP Unit X Tebo Timur
- KPHP Unit XI dan XII Batanghari
- KPHP Unit XIII Muaro Jambi
- KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur



➤ KPHP XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat

a. Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi



2.2. Sumber Daya

Pada Dinas Kehutanan saat ini jumlah seluruh PNS sebanyak 467 orang PNS, dengan rincian Polhut 89 Orang, Penyuluh 37 orang, dan fungsional umum 341 orang . Selain SDM yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya tersebut mereka dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya baik dilapangan maupun di kantor telah dilengkapi dengan peralatan teknologi yang memadai.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengajukan gedung/kantor pinjam/pakai ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan telah dilengkapi dengan peralatan dan sarana penunjang dalam bekerja dikantor. Peralatan penunjang lainnya dalam melaksanakan tugas dilapangan personil Dinas Kehutanan telah memiliki peralatan pengukuran dan perpetaan, untuk polhut telah dibekali dengan senjata api sedangkan khusus untuk kasus kebakaran hutan Dinas Kehutanan juga telah memiliki peralatan pemadam kebakaran hutan yang memadai ditunjang dengan koneksi internet deteksi titik api (satelit NOAA).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Jambi setiap tahun mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundangan.

2.3. Kinerja Pelayanan

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja SKPD sesuai Renstra Tahun 2010 - 2015, sebagian besar program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sudah terlaksana. Namun beberapa masih belum sesuai target yang diinginkan, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain masih lemahnya kapasitas SDM dalam kerangka berpikir akibat adanya penyesuaian dengan pola kerja yang semakin berkembang di era reformasi serta keterbatasan dana.



Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra SKPD tahun lalu					Realisasi	
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan										
1	Identifikasi konflik Pemanfaatan Lahan Dalam Kawasn Hutan				9	9	9	9	9 kab.	9	9
2	Monitoring/Evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan				20	25	15	12	12 ijin	20	25
3	Identifikasi Calon Lokasi HTR dan HTI di Prov. Jambi				7	7	7	7	7 kab.	7	7
4	Pelacakan dan pengawasan kawasan hutan/pendataan teristis hutan lindung				80	70	70	60	60 Km	80	70
5	Pengembangan daerah penyangga kawasan hutan/Pengelolaan hutan Lindung										
6	Identifikasi/inventarisasi potensi kawasan hutan/tata batas parsisipatrif HD dan oreintasi calon HTR				9	9	9	9	9 kab	9	9
7	Penelitian terpadu terhadap perubahan substansif kehutanan dalam				Draf RTRW	Konsep RTRW baru				Draf RTRW	Konsep RTRW baru
II	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan										
1	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan				22	20	20	20	20 ha	22	20
2	Kegiatan Penanaman Tanaman Unggulan Lokal (TUL) dan Fasilitasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa (HD)				77	42	60	60	60 ha	77	42
3	Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)				19	19	19	19	19 Ijin HPH, HTI dan RE	19	19
4	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung				50	40	50	50	50 ha	50	40
5	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Hutan Kenali dan Kebun Raya Bukit sari				42	45	45	50	55 %	42	45
6	Pembinaan dan peningkatan produksi pangan				9,500	0	0	0	0 Bata ng	9,500	0
III	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan										
1	Pengendalian dan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan				600	550	500	450	400 Titip api	600	550
2	Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan				15	15	20	20	25 Kasu s	15	15



3	Penyuluhan Kehutanan				15	17	17	17	17	Penyuluhan kab.	15	17
4	Pengembangan Budidaya Anggrek dan Tanaman Hias				9	9	9	9	9		9	9
IV	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan											
1	Restrukturisasi Industri Kehutanan				104	104	104	104	104	IUPH HK	104	104
2	Optimalisasi PNPB dari SDA sektor Kehutanan				59	31.52	30.5	30.5	30.5	Milyar Rupiah	59	31.52
3	Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan				11	11	11	11	11	Kab/Kota	11	11

V	Program Pelayanan Informasi Kehutanan											
1	Pelayanan Informasi Sumber Daya Hutan				8	12	12	12	12	Sosialisasi	8	12
2	Penyajian informasi kehutanan											
VI	Program Koordinasi Perencanaan dan pembangunan											
1	Perencanaan dan Monitoring Evaluasi				89	90	90	95	95 %		89	90
VII	Program Inventarisasi dan Pemetaan Hutan											
1	Pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan dan sosialisasi hasil tata batas kawasan hutan				527	475.44	352.2	415.36	335.23 km		527	475.44
2	Kegiatan Konsultasi publik dan sosialisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)				-	17	17	17	17 Unit		-	17
3	Monitoring tata batas ijin pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan				9	9	8	7	6 Kab.		9	9

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi



Uraian	Anggaran pada tahun					2011
	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7
Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	1,336,268,300	857,046,500	834,456,300	512,132,000	1,237,300,000	1,100,379,900
Identifikasi konflik Pemanfaatan Lahan Dalam Kawasan Hutan	80,000,000	138,029,300	474,403,300	215,572,000	215,500,000	72,147,000
Monitoring/Evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan	80,000,000	66,140,000	179,297,500	162,950,000	182,000,000	77,672,500
Identifikasi Calon Lokasi HTR dan HTI di Prov. Jambi	80,000,000	175,214,000	180,755,500	133,610,000	133,800,000	69,439,000
Pelacakan dan pengawasan kawasan hutan/pendataan teristis hutan lindung	90,000,000	146,184,400	-	-	150,000,000	84,080,200
Pengembangan daerah penyangga kawasan hutan/Pengelolaan hutan Lindung	-	-	-	-	300,000,000	-
Identifikasi potensi kawasan hutan/tata batas partisipatif HD dan orientasi calon HTR	96,268,300	217,757,200	-	-	256,000,000	83,148,300
Tata Ruang (RTRW)	910,000,000	113,721,600	-	-		713,892,900
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2,606,290,000	1,442,018,060	2,543,886,560	3,361,648,750	2,795,894,000	2,115,253,100
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	200,000,000	192,200,000	221,412,000	586,294,000	440,000,000	174,670,800
Kegiatan Penanaman Tanaman Unggulan Lokal (TUL) dan Fasilitasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa (HD)	544,505,000	337,870,000	338,856,000	382,154,000	328,500,000	397,040,500
Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)	123,950,000	73,050,000	149,533,000	147,100,750	191,500,000	64,266,500

Rasio Antara Realisasi Anggaran pada tahun					Rata - rata pertumbuhan	
2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
12	13	14	15	16	17	18
82.35	73.58	82.94	95.66	86.38	(19,793,660)	48,666,680
90.18	86.70	91.96	99.58	95.37	27,100,000	(13,176,460)
97.09	90.53	69.50	96.20	93.98	20,400,000	2,306,500
86.80	57.84	72.58	88.68	96.27	10,760,000	(21,155,000)
93.42	80.56	-	-	51.42	12,000,000	(12,420,840)
-	-	-	-	-	60,000,000	-



86.37	81.35	-	-	75.61	31,946,340	(26,921,780)
78.45	48.22	-	-	-	(182,000,000)	120,034,260
81.16	92.04	90.16	64.72	76.62	37,920,800	134,647,008
87.34	92.50	94.38	51.48	95.91	48,000,000	(3,505,840)
72.92	92.38	88.64	47.97	82.37	(43,201,000)	11,834,100
51.85	70.24	97.11	63.36	99.65	13,510,000	(1,756,700)
					-	-

Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sekitar Tanjung	1,057,835,000	750,502,060	1,406,468,040	1,608,546,000	1,478,394,000	841,133,300
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Hutan Kenali dan Kebun Raya Bukit sari	600,000,000	-	427,617,520	637,554,000	357,500,000	579,835,000
Pembinaan dan peningkatan produksi pangan	80,000,000	88,396,000	-	-	-	58,307,000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	892,300,000	860,190,000	1,979,124,200	1,658,848,500	1,395,081,400	750,608,310
Pengendalian dan Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	373,000,000	345,220,000	331,134,000	400,000,000	400,000,000	268,721,700
Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan	175,000,000	90,170,000	931,547,800	612,698,000	567,881,400	164,763,610
Penyuluhan Kehutanan	174,300,000	145,300,000	293,028,900	211,572,000	177,200,000	156,311,500
Pengembangan Budidaya Anggrek dan Tanaman Hias	170,000,000	279,500,000	423,413,500	434,578,500	250,000,000	160,811,500
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	333,000,000	89,729,450	580,027,900	624,024,000	628,000,000	322,160,110
Restrukturisasi Industri Kehutanan	158,000,000	89,729,450	148,432,000	128,412,000	250,000,000	157,396,500
Optimalisasi PNPB dari SDA sektor Kehutanan	-	-	-	123,732,000	-	-
Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan	175,000,000	-	431,595,900	371,880,000	378,000,000	164,763,610
Program Pelayanan Informasi Kehutanan	367,107,000	290,200,000	569,173,000	300,000,000	187,014,000	349,876,246
Pelayanan Informasi Sumber Daya Hutan	367,107,000	290,200,000	569,173,000	300,000,000	187,014,000	349,876,246
Penyajian informasi kehutanan	-	-	-	-	263,954,000	-
Program Koordinasi Perencanaan dan pembangunan	175,000,000	519,176,030	308,490,000	262,954,000	228,872,982	165,083,400
Perencanaan dan Monitoring Evaluasi	175,000,000	519,176,030	308,490,000	262,954,000	228,872,982	165,083,400
Program Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	-	-	1,094,204,299	756,121,200	455,000,000	-



79.51	93.22	86.75	75.70	62.01	84,111,800	18,126,248
96.64	-	97.97	59.52	95.70	(48,500,000)	115,967,000
72.88	97.69	-	-	-	(16,000,000)	(6,017,800)
84.12	80.81	87.80	61.64	94.41	100,556,280	(21,916,338)
72.04	73.86	63.98	57.37	93.57	5,400,000	(15,299,660)
94.15	95.23	93.60	73.18	95.90	78,576,280	14,918,722
89.68	87.22	93.16	88.21	99.09	580,000	2,202,300
94.60	81.40	89.97	36.36	89.07	16,000,000	(23,737,700)
96.74	99.15	98.26	79.49	99.72	59,000,000	46,486,132
99.62	99.15	96.73	88.01	99.41	18,400,000	13,533,410
-	-	-	74.45	-	-	-
94.15	-	98.78	78.23	99.92	40,600,000	32,952,722
95.31	94.98	96.81	88.84	97.56	(36,018,600)	11,935,249
95.31	94.98	96.81	88.84	97.56	(36,018,600)	11,935,249
-	-	-	-	83.95	52,790,800	-
94.33	94.16	98.36	94.87	99.09	10,774,596	(70,818,526)
94.33	94.16	98.36	94.87	99.09	10,774,596	(70,818,526)
		66.88	66.67	86.26	91,000,000	-

Pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan dan sosialisasi hasil tata batas kawasan hutan	-	-	361,204,300	258,073,200	345,000,000	-
Kegiatan Konsultasi publik dan sosialisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	-	-	732,999,999	133,288,000		-
Monitoring tata batas ijin pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan	-	-	-	364,760,000	110,000,000	-
Jumlah total	5,709,965,300	4,058,360,040	6,815,157,960	6,719,607,250	6,472,162,382	4,803,361,066

		78.87	82.44	87.10	69,000,000	-
--	--	-------	-------	-------	------------	---



		60.98	75.81		-	-
			52.18	83.63		
					22,000,000	-
					152,439,416	149,000,205

2.4. Tantangan Pengembangan pelayanan Dinas Kehutanan

1. Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan Kabupaten/Kota bidang Kehutanan di limpahkan ke Provinsi maka semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang kehutanan ditingkat tapak dilaksanakan oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat sekitar hutan dalam bidang kehutanan seperti perijinan Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat Hutan Desa dan Program Pemerintah lainnya lebih singkat (efektif dan efisien) sehingga diharapkan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mengerakan sektor – sektor startegis ekonomi domestik
2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan penanaman lahan kritis didalam kawasan dan diluar kawasan terutama ditujukan untuk masyarakat sekitar hutan dan Pembangunan yang rendah emisi di bidang kehutanan untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sehingga diharapkan meningkat produk mayarakat mempunyai daya saing di pasar internasional



3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan merupakan perlindungan hutan terhadap pembalakan liar, kebakaran hutan dan penyerobotan lahan dengan adanya program ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam menjaga keberadaan kawasan hutan dan fungsinya sehingga memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pemilihan lingkungan internal dalam konteks yang berkenaan dengan kompetensi administrasi publik disini adalah dalam kerangka pemikiran tentang upaya perwujudan good governance, sehingga tidak secara eksplisit dirumuskan sebagai lingkungan instansi Dinas Kehutanan sebagai suatu organisasi, tetapi lebih ditujukan kepada suatu lingkungan internal dimana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sekitar sektor kehutanan, sudah menjadi suatu kerangka sistem dalam pengelolaan hutan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan



Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan SKPD sebagaimana tugas dan fungsinya, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah SDM teknis kehutanan belum memadai (rasio luas kawasan dengan SDM)

Luas kawasan hutan di Provinsi Jambi \pm 2,098.535 Ha, dengan luasan yang dikelola/diawasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi seluas \pm 1. 413.064 ha (Hutan Produksi, Hutan Produksi Tetap, Hutan Konversi dan Hutan Lindung) dengan jumlah seluruh PNS sebanyak 467 orang PNS, dengan rincian Polhut 89 Orang, Penyuluh 37 orang, dan fungsional umum 341 orang, kedepannya mempunyai tantangan yang cukup berat dalam mewujudkan Visinya untuk menuju Hutan Lestari.

2. Belum lengkapnya data base kehutanan (potensi dan penggunaan kawasan hutan)

Saat ini Dinas Kehutanan Provinsi Jambi belum memiliki data yang akurat mengenai potensi kawasan hutan yang ada, baik itu potensi hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Data penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten juga tidak semuanya diketahui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, terutama data citra satelit untuk menghitung luas tutupan lahan di Provinsi Jambi.

3. Belum Mantapnya Re-Organisasi

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2017 tentang Pembentukan, Penyusunan organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah memiliki UPTD KPHP sebanyak 11 dan Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2018 tentang Pembentukan,



Penyusunan organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Taman Hutan Raya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, memiliki 1 UPTD Tahura,, namun struktur yang relatif baru ini belum berjalan dengan baik , karena dukungan pendanaan Dinas Kehutanan yang minim.

- 4. Belum mantapnya kepastian hukum batas kawasan hutan** (revisi tata ruang, update data hasil-hasil tata batas, tata batas belum temu gelang) Kawasan hutan yang ada semuanya telah di tata batas baik itu batas fungsi maupun batas luar, namun batas-batas tersebut belum temu gelang.

- 5. Kurangnya sosialisasi dibidang kehutanan** (penyebaran informasi) kasus-kasus illegal logging, kebakaran hutan dan perambahan kawasan hutan disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan fungsi dan manfaat hutan. Tanpa merusak hutan seperti yang masyarakat lakukan saat ini sebenarnya mereka juga dapat sejahtera. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kasus-kasus tersebut diatas.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam rangka pencapaian Visi Jambi TUNTAS 2021 serta sebagai wujud dukungan SKPD terhadap Misi Kepala Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengemban serangkaian tugas dan fungsi dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3.1 . Telaah visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi



Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Startegi	
Provinsi Jambi yang Tertib	1.				
Provinsi Jambi yang Unggul	2.				
Provinsi Jambi yang Nyaman	3.				
Provinsi Jambi yang Tangguh	4. -				
Provinsi Jambi yang Adil	5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari	Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari	Mengelola dan merencanakan kawasan hutan secara baik	1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 6. M 7. n 8. M 9. c 10. M 11. M 12. M 13. M 14. M 15. M 16. M 17. M 18. F 19. M 20. M



					21. M 22. M 23. F D
			Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Menurunkan luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	1. M F 2. M p M 3. M 4. M p F k 6. M k
			Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Menurunkan luas lahan kritis di Provinsi Jambi	1. F k T 2. M H U 3. M s S 4. M 5. M c 6. M 7. M 8. H p
Provinsi Jambi yang Sejahtera	6.				

Dari tabel diatas dapat digambarkan Dinas Kehutanan termasuk dalam Misi 5 pembangunan Provinsi Jambi, dengan sasaran dan tujuan serta arah kebijakan pada tiap – tiap misi yang diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman kegiatan sampai dengan tahun 2021

A. Kekuatan (Strengthen)

- 1. Adanya peraturan dibidang kehutanan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara**



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan semua kegiatan di bidang Kehutanan kewenangannya diserahkan ke Provinsi dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) kecuali kabupaten/kota yang mengelola Taman Hutan Raya (TAHURA).

- 2. Kebijakan nasional** (HTR, HKm, Hutan Desa , Hutan Adat, 1 miliar pohon, penanggulangan illegal logging, perambahan kawasan hutan, restorasi ekosistem, penanggulangan kebakaran hutan, KPH, kebun bibit rakyat, RHL) Adanya kebijakan Nasional untuk rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat, Gerakan penanaman 1 Miliar pohon, Kebun Bibit Rakyat dan pemberian ijin Restorasi Ekosistem merupakan kebijakan pemerintah untuk menuju hutan lestari dan membuka ruang untuk pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Selain kebijakan tersebut diatas pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) dalam hal ini bekerja sama dengan TNI dan Polri. Dalam penanggulangan kasus kebakaran hutan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi juga telah mengeluarkan Perda larangan untuk membakar lahan dan hutan dalam membuka lahan. Struktur 11 KPHP atau KPHL yang proyeksikan berada pada kawasan tapak untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan yang berada pada wilayahnya



3. Peraturan Gubernur tentang KARHUTLA, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah membuat Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 tahun 2016 Tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

4. Isu-isu internasional (UNFCCC cop 21)

Adanya Isu-isu Internasional tentang perubahan iklim, Dalam Conference of Parties 21 Paris (COP 21), Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia sanggup menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030. Bahkan, sampai 41 persen jika mendapatkan bantuan internasional, dimana sektor yang paling mendominasi dalam meningkatkan cadangan carbon adalah sektor Lahan (Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian) Dan Isu tentang pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean 2016.

5. Pasar hasil hutan kayu dan non kayu di tingkat lokal, regional maupun global)

Tersedianya pasar hasil hutan kayu dan non kayu ditingkat lokal, regional maupun global yang mempunyai ikatan dagang yang sangat kuat dengan pengusaha industri berbasis kehutanan yang telah ada di Provinsi Jambi.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang Kehutanan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang Kehutanan yang berada di Provinsi Jambi terdiri dari dalam dan luar negeri, yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pengelolaan Hutan.

7. Badan Restorasi Gambut BRG)

Badan Restorasi Gambut (BRG) merupakan Program pemerintah pusat yang dikhususkan untuk Provinsi yang mempunyai aea/lahan Gambut dalam bentuk tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh 3



(tiga) OPD yaitu Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan, kegiatannya meliputi Pembangunan kanal, Sumur Bor dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang bergantung

B. Kelemahan (Weakness)

- 1. Tingkat kesadaran dunia usaha dan masyarakat terhadap kelestarian hutan masih rendah** (perekonomian/pengetahuan/pemahaman masyarakat disekitar hutan rendah)

Kondisi perekonomian, pengetahuan dan pemahaman masyarakat disekitar hutan yang rendah akan fungsi dan manfaat hutan mengancam kelestarian hutan.

- 2. Ilegal logging dan perambahan kawasan hutan, (pembalakan liar dan peredarannya, open akses eks HPH)**

Masih tingginya pencurian kayu di dalam kawasan hutan dan masih berlangsungnya kegiatan perambahan kawasan hutan, hal ini masih merupakan ancaman yang harus segera dicari jalan keluarnya.

- 3. Pola kepemilikan/pemanfaatan lahan diluar kawasan hutan** (implementasi peraturan pertanahan belum optimal, lahan tidur belum dimanfaatkan, produktifitas lahan masih rendah)

Kepemilikan tanah oleh masyarakat yang tidak proposional di luar kawasan hutan, dipihak lain masih banyak kepemilikan tanah lebih dari 25 Ha, disisi lain belum dimanfaatkanya lahan-lahan kosong.

- 4. Dumping dan persaingan harga kayu olahan ditingkat internasional** (produk kayu olahan/plywood dari cina lebih murah).



Banyaknya negara lain yang masih menerapkan strategi dumping , dimana harga produk ekspor yang diterapkan lebih murah dari pada harga yang ada di dalam negeri. Hal ini membuat produk lokal tidak laku.

5. Lemahnya penegakan hukum dibidang kehutanan (putusan pengadilan belum memberikan efek jera).

Di dalam pemberian hukuman oleh penegak hukum dirasa belum maksimal dibandingkan dengan kesalahan yang telah diperbuat, hal ini membuat pelaku tidak jera dan berakibat kasus pidana di bidang Kehutanan terus berulang dan terjadi.

6. Perubahan iklim yang sangat drastis.

Perubahan iklim sangat drastis menyebabkan faktor cuaca berubah – ubah sangat cepat sehingga pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan susah di prediksi.

7. Pelimpahan Kewenangan

Pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota ke Provinsi dengan kondisi Sumber Daya Manusia bidang kehutanan terbatas dan kemampuan pembiayaan kurang memadai untuk mengelola kawasan hutan di Provinsi Jambi.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :

1. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermanfaat dan terpercaya, dengan sub agenda kegiatan :



- Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar
- 2. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dengan sub agenda kegiatan :
 - Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional
- 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan sub agenda kegiatan :
 - Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan
 - Perbaikan kualitas lingkungan hidup
 - Penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan
 - Peningkatan ketahanan air

Sedangkan Prioritas pembangunan bidang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masuk pada bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, yang merupakan modal utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi berbasis SDA dan LH yaitu :

1. Peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan, sasarannya meliputi,
 - Pengembangan KPH produksi dan produk kayu
 - Pengembangan KPH lindung dan hasil hutan bukan kayu
2. Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS.
 - Peningkatan kinerja tata kelola kehutanan
 - Peningkatan konservasi dan keanekaragaman hayati
 - Peningkatan pengelolaan DAS
3. Peningkatan lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian kehati.



- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 - Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - Memperkuat kapasitas pengelolaan lingkungan hidup
 - Melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi kehati, sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020.
4. Penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.
- Meningkatkan penanganan perubahan iklim baik kegiatan mitigasi tercermin dengan menurunnya emisi GRK di lima sektor prioritas.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Lingkungan Strategis Internasional

Perubahan tatanan global yang terjadi sangat pesat, merupakan lingkungan strategis global yang perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan pada penetapan alternatif strategi pada setiap strata kewenangan kebijakan, baik di tingkat Nasional, Propinsi, maupun Kabupaten.

Lingkungan strategis Internasional ini antara lain :

- ⌘ Efek dari penandatanganan Conference of Parties 21 Paris (COP 21), dimana Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia sanggup menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030. Bahkan, sampai 41 persen jika mendapatkan bantuan internasional, dimana sektor yang paling mendominasi dalam meningkatkan cadangan carbon adalah sektor Lahan terutama bidang Kehutanan.
- ⌘ Perkembangan pasar bebas global maupun regional , antara lain terjalannya kesepakatan-kesepakatan AFTA (*Asian Free Trade Agreement*), NAFTA(*North Atlantic Free Trade Agreement*), GATT(*General Agreement for Trade and Tariff*),



dan WTO (*World Trade Organization*), akan menjadi faktor yang mempunyai pengaruh signifikan dalam penetapan kebijakan-kebijakan administrasi publik. Pasar bebas global ini akan berpengaruh pada kebijakan yang berkenaan dengan nilai sebenarnya (*actual value*) dari kayu, dan secara sistemik akan mempunyai daya ungkit /pengungkitan (*leverage*) kepada Sistem Pengelolaan Kehutanan di Indonesia.

- ⌘ Isu lingkungan global yang sudah nyata menekan dan menuntut Indonesia memperbaiki kinerja pengelolaan sumber daya hutan dan industri berbasis kehutanan, memerlukan sikap tanggap administrasi publik di dalam menetapkan pilihan alternatif strategisnya, sehingga dapat diterima oleh masyarakat Internasional.

Kekuatan pengaruh lingkungan strategis global ini ternyata sudah dapat digambarkan oleh adanya kewajiban yang dituntut masyarakat internasional kepada Indonesia antara lain untuk memenuhi komitmen Indonesia kepada CGI (*Consultative Group on Indonesia*).

2. Lingkungan Strategis Nasional

Otonomisasi atau desentralisasi yang sedang berlangsung pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan lingkungan strategis Nasional, yang akan berpengaruh sangat nyata di dalam penetapan kebijakan publik dan operasionalisasi administrasi publik di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Peletakan kewenangan yang besar pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, merupakan titik balik tumpuan tanggung jawab dan mobilitas kebijakan yang semula sentralistik menjadi terbagi kepada provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten. Kegagalan Pemerintah Provinsi atau



Pemerintah Kabupaten menanggapi pergeseran lingkungan strategis ini, akan merupakan kegagalan pemerintah mensinergikan mobilitas kebijakan dan pada akhirnya akan merupakan kegagalan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmennya.

Kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan yaitu :

1. Pemantapan Kawasan Hutan.
2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung DAS melalui Rehabilitasi 15 DAS Prioritas dan 30 DAS Prioritas sampai 2019.
3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan
4. Konservasi Keanekaragaman Hayati
5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan
6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan
7. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan
8. Penguatan Kelembagaan Kehutanan.
9. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

3. Lingkungan Strategis Provinsi

Kesenjangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dari sumber daya alam hutan, dengan kebutuhan bahan baku industri berbasis kehutanan, merupakan faktor lingkungan strategis di Provinsi Jambi. Berdasarkan data Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) jumlah industri 88 unit dengan rendemen rata-rata 50 %, berdasarkan kapasitas produksi ijin yang dimiliki memerlukan bahan baku kayu bulat sebanyak $\pm 17.100.000$ M³/tahun. Sedangkan ketersediaan bahan baku kayu bulat yang ada, berdasarkan sistem Pengelolaan Hutan Lestari/ berkelanjutan (*Sustainable Forestry Management*), paling besar hanya sebesar $\pm 9.102.000$ M³/tahun.

Di Propinsi Jambi juga terdapat 4 (empat) unit Taman Nasional (National Park), yang merupakan beban amanat dari masyarakat



Internasional, untuk dijaga keutuhannya. Keempat Taman Nasional tersebut adalah :

- ⌘ Taman Nasional Kerinci Seblat
- ⌘ Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
- ⌘ Taman Nasional Berbak, dan
- ⌘ Taman Nasional Bukit Dua Belas.

Lingkungan strategis yang lain adalah kondisi masyarakat lokal yang melakukan perambahan lahan kawasan hutan dan penebangan liar (*illegal logging*) yang saat ini semakin tidak terkendali/ anarkis dengan dalih bahwa saat ini seluruh potensi sumber daya alam harus dapat langsung dinikmati oleh rakyat sebagai tebusan atas semua yang telah terjadi pada pemerintahan yang lalu.

Isu Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi antara lain :

1. Banyaknya kawasan hutan yang masih belum ada pengelola di tingkat tapak
2. KPHP dan KPHL yang merupakan unit pengelola di tingkat tapak belum dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya secara baik.
3. Tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan serta perambahan kawasan.
4. Jumlah Sumber daya manusia pengelola kehutanan yang terbatas.

4. Asumsi

Asumsi adalah merupakan konklusi tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi dalam mencapai visi dan melaksanakan misinya, karena akan berpengaruh terhadap hubungan internal organisasi. Asumsi ini akan dipakai sebagai dasar-dasar untuk menetapkan dan menyusun perencanaan strategis, dan



merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategis.

Dalam hubungannya dengan substansi pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan secara lestari, dapat dirumuskan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Pembiayaan untuk data base Kehutanan Provinsi masih memperoleh dukungan sistem dan dana pemerintah pusat.
2. Investasi Pengusahaan Hutan dan Industri berbasis Kehutanan dalam kerangka sistem yang telah ada masih dihargai.
3. Kewenangan dan sistem hukum dan kebijakan yang tersedia masih dianggap relevan dalam proses otonomisasi.
4. Dukungan politis dari kalangan legislatif dan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk pembenahan sektor kehutanan dapat dikonsolidasikan.
5. Proses otonomisasi dapat terlaksana dengan baik, dalam arti ada kesadaran bersama bahwa peletakan kewenangan di bidang kehutanan tidak hanya bermakna desentralisasi wewenang tetapi juga berkenaan dengan pertanggung jawabannya.
6. Komitmen dukungan Internasional kepada Indonesia, tetap tersedia dalam kerangka kerjasama bilateral maupun multilateral.

5. Nilai-nilai

Nilai-nilai yang akan diterapkan dalam pelaksanaan misi untuk pencapaian visi organisasi, adalah nilai-nilai yang memenuhi prinsip-prinsip semangat pelaksanaan Good Governance, reformasi birokrasi dan nilai dasar moral dan etika rimbawan, yaitu : *Kejujuran, Keterbukaan, Komitmen, tanggungjawab, profesionalisme, Kesetaraan, Supremasi Hukum, Partisipasi masyarakat, Disiplin, ikhlas, adil, peduli, kerjasama, visioner,*



BAB IV

MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. MISI DINAS KEHUTANAN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahap II tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan Visi di Provinsi Jambi yaitu : “ **Tertib, Unggul, Nyaman, Tanguh, Adil dan Sejahtera 2021**”.

Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan sektor kehutanan dan pembangunan daerah tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, maka ditetapkan misi Dinas Kehutanan adalah:

“ Terwujudnya Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera Menuju Jambi Tuntas 2021”

Misi organisasi diharapkan akan dapat mencapai tujuan dibentuknya Dinas Kehutanan sebagai instansi yang bertanggung jawab dan menjadi satu-satunya instansi yang mempunyai kompetensi utama di Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan secara lestari, yang dalam jangka pendek diorientasikan untuk mencapai komitmen kepada masyarakat Internasional, Nasional dan Daerah yang prinsipnya untuk pencapaian upaya perbaikan kondisi pengelolaan hutan di Provinsi Jambi, dan secara umum untuk perbaikan Sistem Pengelolaan Hutan Nasional.

Untuk mewujudkan Misi Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi termasuk dalam Misi 5 yaitu : **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.**



4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

a. Tujuan

Untuk mencapai misi organisasi maka sebagai langkah selanjutnya menetapkan, Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang dirumuskan sebagai berikut :
“Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari “

b. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran organisasi dirumuskan untuk menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Pada tahap berikutnya sasaran ini akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Aggressive but Attainable*), berorientasi kepada hasil (*Result oriented or Realistic*) dan dapat direalisasikan dalam waktu tertentu (*Time bound*), biasanya disingkat sebagai SMART. Sasaran organisasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam dunia usaha
3. Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Pada Awal Periode (2015)	T	
					2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari	Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari	Presentase Pengelolaan hutan yang lestari	33 %	-	-



	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Presentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	5.542 Ha	5 %	5 %
	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis	844.647 Ha	0 %	0.1 %

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kinerja Pada Awal Periode (2015)	T	
					2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari		Indikator Tujuan : Persentase pengelolaan hutan yang lestari	33 %	-	-
		Sasaran 1 : Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan	Indikator Sasaran 1 : Kontribusi redistribusi daerah sektor Kehutanan terhadap total Pendapatan Asli Daerah /PAD (%)	0.01 %	0.01 %	1.0 %
		Sasaran 2 : Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Indikator Sasaran 2 : Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	5.542 Ha	5 %	5 %
		Sasaran 3 : Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Indikator Sasaran 3 : Persentase penurunan lahan kritis	844.647 Ha	0 %	0.1 %

4.3. STRATEGI

Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dapat di simpulkan sebagai berikut :



1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dnas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi
2. Peningkatan kedisiplinan dan keseragaman berpakaian
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan standar daerah
4. Peningkatan Sumber daya manusia di bidang kehutanan
5. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
6. Inventarisasi subjek dan objek konflik dengan cara mendata daerah yang rawan konflik terutama konflik batas kawasan hutan.
7. Memperluas dan menata kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
8. Memenuhi target capaian PNBPN (%).
9. Restribusi daerah sektor kehutanan terhadap PAD total
10. Mengelola dan merencanakan kawasan hutan secara baik
11. Menurunkan luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar
12. Menurunkan luas lahan kritis di Provinsi Jambi

4.4. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dapat di simpulkan sebagai berikut :

24. Menyusun pengelolaan KPHL dan KPHP berbasis geospasial digital
25. Membuat usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan
26. Menyebarkan informasi kegiatan dinas kehutanan dan pemasaran hasil hutan di website
27. Membentuk kelompok tani hutan
28. Menunjuk lokasi PHBM
29. Memfasilitasi pembentukan Hutan adat
30. mengalakkan agroforestry dan agrofishery



31. Memfasilitasi penataan batas Hutan Desa, HTR, HKM dan Hutan Adat
32. Pendampingan kelompok usaha Perhutanan Sosial
33. Mengembangkan Hasil Hutan kayu dan hasil hutan Non Kayu
34. Memberi bantuan Mesin dan Peralatan Pengolahan Hasil Hutan Non Kayu .
35. Memberi bantuan Mesin dan Peralatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu kepada pemilik lahan hutan hak
36. Menambah HPH/HA dan hutan hak yang mendapat sertifikasi legal
37. Mensosialisasikan kepada masyarakat, pelaku usaha mengenai pemanfaatan kayu rakyat dan teknologi pengolahan hasil hutan berwawasan lingkungan
38. Mengawasi dan Pengendalian pada pemegang IUPHHK
39. Mengurangi Jumlah kasus peredaran hasil hutan kayu illegal
40. Menambah Jumlah IUPHHK HT/HA, IUIPHHK dan hutan hak yang sudah menggunakan aplikasi online untuk penatausahaan hasil hutan kayu
41. Pelaksanaan sosialisasi tata batas kawasan hutan untuk terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan
42. Melakukan rekontruksi Batas kawasan hutan sesuai dengan posisi berita acara tata batas
43. Melakukan pemeliharaan rintis batas dan Pal batas kawasan hutan
44. Mengevaluasi IPPKH.
45. Menyelesaikan konflik kehutanan
46. Pemantapan dan Evaluasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (PEP RAD-GRK)
47. Melaksanakan Patroli dan Ground Chek dalam rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan



48. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
49. Membentuk masyarakat peduli api (MPA)
50. Melaksanakan Operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan
51. Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan
52. Melakukan koordinasi dalam proses penegakan hukum kehutanan
53. Pengadaan dan pengembangan bibit / benih tanaman kehutanan untuk KPH, Taman Hutan Kenali dan TAHURA
54. Melakukan Penanaman dan pemeliharaan Pohon pada Hutan Wisata, KPH, TAHURA, Arboreteum, Tanaman Unggulan lokal dan hutan adat
55. Membuat Bibit Tanaman Kehutanan yang Berkualitas (sertifikat)dan Koleksi Tumbuhan Dataran Rendah Sumatera
56. Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
57. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi diluar kawasan hutan di 11 KPHP
58. Melakukan Rehabilitasi kawasan hutan di 11 KPHP
59. Memelihara tanaman pada kawasan hutan di 11 KPHP
60. Meningkatkan pengelolaan KPH, Tahura, Hutan Kota, Hutan Rakyat dan Pengembangan usaha ekonomi produktif

Tabel. 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera Menuju Jambi TUNTAS 2021		
Misi 5 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi



1. Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari	Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari	Mengelola dan merencanakan kawasan hutan secara baik
	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Menurunkan luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar



	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Menurunkan luas lahan kritis di Provinsi Jambi
--	---	--



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program

Langkah lebih lanjut setelah dirumuskan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan nilai-nilai dasar Rimbawan serta asumsi, adalah penetapan Program, yang akan dijabarkan lebih lanjut menjadi Kegiatan, yaitu :

Program Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

APBD

1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2. Perencanaan dan Pengembangan Hutan
3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di kawasan hutan dan non hutan
5. Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Peningkatan Disiplin Aparatur
8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9. Peningkatan Pengembangan dan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan.

APBN



1. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan.
2. Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung.
3. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
4. Planologi dan Tata Lingkungan.
5. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
6. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7. Pengendalian Perubahan Iklim.
8. Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Pembangunan

Dengan merujuk pada Program pembangunan kehutanan tersebut, maka Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merumuskan kegiatan teknis Bidang Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Pembangunan KPHP, KPHL di Provinsi Jambi
2. Pengembangan hutan tanaman di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Pengembangan kelompok tani usaha kehutanan dan pengembangan hutan masyarakat adat di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
4. Pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
5. Pengembangan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
6. Monitoring dan fasilitasi PNBK dan PAD sektor kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
7. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
8. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
9. Pengembangan hasil hutan non kayu di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi



10. Pengembangan, pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
11. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
12. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
13. Pengembangan hasil hutan non kayu di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
14. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di 11 KPHP dan tahura
15. Perencanaan kegiatan pengelolaan KPHP dan KPHL. di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
16. Penelitian terpadu terhadap usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
17. Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
18. Kegiatan pemantapan dan evaluasi pelaporan rencana aksi daerah gas rumah kaca (PEP RAD-GRK) Provinsi Jambi di Dinas Kehutanan.
19. Pengelolaan kawasan hutan di 11 KPHP dan Tahura
20. Pengelolaan hutan kenali
21. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
22. Pembentukan/pembinaan Masyarakat Sadar Api (MPA) di Dinas Kehutanan, 11 KPHP dan Tahura
23. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Dinas Kehutanan, 11 KPHP dan Tahura
24. Monitoring sumber daya manusia dan sarana prasarana kebakaran di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 11 KPHP dan tahura
25. Pelatihan keteknikan untuk menunjang Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di 11 KPHP



26. Sarana dan Prasarana kebakaran hutan dan lahan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 11 KPHP dan tahura
27. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 11 KPHP dan tahura
28. Monev bekas kebakaran hutan dan lahan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 11 KPHP dan tahura
29. Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan 11 KPHP
30. Pengamanan batas kawasan hutan dan kawasan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan 11 KPHP
31. Koordinasi penegakan hukum dalam rangka pemanggilan saksi tersangka/ahli serta pengurusan ijin sita pengadilankabupaten /kota di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan 11 KPHP
32. Bimbingan teknis penggunaan senjata api di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan 11 KPHP
33. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 11 KPHP dan tahura
34. Pemantapan kawasan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan 11 KPHP
35. Evaluasi izin pinjam pakai kawasan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Provinsi Jambi dan 11 KPHP
36. Fasilitasi penanganan konflik dalam kawasan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan 11 KPHP
37. Konservasi kawasan esensial (bernilai ekosistem penting) dan keanekaragaman hayati di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
38. Pengamanan dan perlindungan hutan di 11 KPHP dan Tahura
39. Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
40. Pengembangan bibit/benih tanaman kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi



41. Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
42. Pelaksanaan penanaman pada kawasan hutan industri dan wisata di 11 KPHP dan tahura
43. Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata Provinsi Jambi.
44. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
45. Monitoring Pengelolaan DAS di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
46. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di 11 KPHP dan tahura
47. Rehabilitasi kawasan hutan di 11 KPHP dan tahura
48. Pemeliharaan tanaman pada kawasan hutan di 11 KPHP dan tahura
49. Peningkatan pengelolaan KPH, Tahura, Hutan Kota, Hutan Rakyat dan Pengembangan usaha ekonomi produktif di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Sedangkan untuk Program rutin dan perencanaan , Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merumuskan kegiatan untuk tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan 11 KPHP
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan 11 KPHP
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan 11 KPHP



6. Penyediaan alat tulis kantor di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan 11 KPHP
7. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan 11 KPHP
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan 11 KPHP
9. Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan 11 KPHP
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan 11 KPHP
11. Penyediaan makanan dan minuman di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan 11 KPHP
12. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan 11 KPHP
13. Pengadaan kendaraan dinas/operasional di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
14. Penyediaan perlengkapan gedung kantor di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
15. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
16. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
17. Pendidikan dan pelatihan formal di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
18. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
19. Monitoring evaluasi dan pelaporan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.



TABEL. 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

Tujuan	SASARAN	Indikator Sasaran	KODE			PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN								
								2016	Rp (juta)	2017	2018					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11				
Meningkatkan pengelolaan hutan lestari	Pelayanan Administrasi perkantoran dengan baik	Jumlah Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi	8.25%	10.60 %	4,162	13%	3,3				
						01	01	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Jumlah Surat Menyurat	10.000 Surat	10.000 Surat	17,65	13.000 Surat		
						01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air, listrik Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Jumlah pelaksanaan Pembayaran Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	346,2	12 Bulan	9	
						01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Presentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	-			100%	20
						01	01	04	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Presentase pelaksanaan administrasi keuangan	100%	100%	311,4	100%	4	



			01	01	05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Presentase Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	100%	100%	175,45	100%	3
			01	01	06	Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Presentase Penyediaan ATK	100%	100%	135,1	100%	4
			01	01	07	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Presentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	30,7	100%	7
			01	01	08	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Presentase Penerangan Kantor Dishut	100%	100%	12,48	100%	5
			01	01	09	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Presentase kebutuhan peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	100%	31,08	100%	6
			01	01	10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Presentase Penyelenggaraan administrasi yang baik	100%	100%	6	100%	2
			01	01	11	Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Presentase pelaksanaan dan pelayanan terhadap penyediaan makanan dan minuman	100%	100%	27	100%	5
			01	01	12	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Jumlah pelaksanaan Perjalanan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	411,1	12 Bulan	1,



			01	01	13	Operasional rutin UPTD KPHP Unit I Kerinci	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	0	0	0	0	
			01	01	14	Operasional rutin UPTD KPHP Unit II dan III Bungo	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	0	0	0	0	
			01	01	15	Operasional rutin UPTD KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	0	0	0	0	
			01	01	16	Operasional rutin UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	0	0	0	0	
			01	01	17	Operasional rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	0	0	0	0	
			01	01	18	Operasional rutin UPTD KPHP Unit IX Tebo Barat	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	0	0	0	0	
			01	01	19	Operasional rutin UPTD KPHP Unit X Tebo Timur	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	0	0	0	0	
			01	01	20	Operasional rutin UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	0	0	0	0	
			01	01	21	Operasional rutin UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	0	0	0	0	
			01	01	23	Operasional rutin UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	0	0	0	0	
			01	01	24	Operasional rutin UPTD KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di KPHP	0	0	0	0	



			01	01	25	Operasional rutin UPTD TAHURA	Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin di TAHURA	0	0	0	0	
	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Dinas Kehutanan	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Disiplin aparatur	Prosentase pengelolaan hutan yang lestari	33%	34%	795	35%	1,2
01			02	01	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Jumlah Kebutuhan Kendaraan bermotor 4 Unit Mobil, Motor 4 Unit	0	0	0	2 Unit Mobil, 2 Unit Motor	6	
01			02	02	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Presentase kebutuhan peralatan gedung kantor dengan baik	100%	100%	95,8	100%	4	
01			02	03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Presentase Perbaikan/pemeliharaan gedung kantor dengan baik	100%	100%	50	100%	3	
01			02	04	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Presentase Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dengan baik	100%	100%	418	100%	7	
01			02	05	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Presentase Perbaikan/pemeliharaan peralatan gedung kantor ditempat kerja semakin baik	100%	100%	76,5	100%	1	
			Pemenuhan pengadaan pakaian dinas	Jumlah Pakaian dinas yang dibuat	01	03		Program Peningkatan disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan Disiplin aparatur sesuai standar daerah	100%	100%	60



		01	03	01	Kegiatan pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Presentase Keseragaman Pakaian Dinas Pegawai dan perlengkapannya	100%	100%	60	100%	2
Meningkatnya kualitas SDM bidang kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang berkualitas	01	04		Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Manusia	Persentase SDM yang Berkualitas	100%	100%	74,5 -	100%	15
		01	04	01	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Presentase SDM yang Berkualitas	100%	100%	74,5	100%	1
		01	04	02	Peningkatan sumber daya pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset	Prosentase SDM bidang penatausahaan keuangan dan asset yang terampil	-	-	-	-	
Meningkatkan kualitas kinerja aparatur	Penilaian laporan Kinerja Dinas Kehutanan	01	05		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP/Laporan Kinerja Dinas Kehutanan A	60%	100%	360	100%	3
		01	05	01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA, Renja, LKJ, Laporan Tahunan Kehutanan, LPPD, DPPA, DIPA, Renstra dan laporan Kinerja A	9 Dokumen proses anggaran dari perencanaan dan pelaporan dan Laporan Kinerja Nilai A	9 Dokumen	170	9 Dokumen	1
		01	05	02	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Buku Statistik Kehutanan, Persentase terlaksananya Sinkronisasi Program, Monitoring evaluasi APBD 35 Kegiatan, APBN 1	6 Dokumen	6 Dokumen	190	7 Dokumen	1



							Kegiatan					
--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

Tujuan	SASARAN	Indikator Sasaran	KODE			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN				
			2016	Rp (juta)	2017							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Meningkatkan Pengelolaan hutan lestari	Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari	Prosentase pengelolaan hutan yang lestari	.02	16		Program Perencanaan dan Pengembangan hutan	Prosentase pengelolaan hutan yang lestari	33%	34%	795	35%	1,4
		Persentase kawasan yang dikelola berbasis data geospasial	.02	16	01	Perencanaan Kegiatan Pengelolaan KPH.KPHL	Jumlah Peta informasi kehutanan berbasis Geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan	0 Peta	-	150	1 Peta	1
		Persentase rencana Kehutanan yang dilaksanakan					Jumlah Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	1 Dokumen	-	0	1 Dokumen	3
		data inventarisasi kawasan hutan yang telah berubah menjadi Fasum dan Fasos	.02	16	02	Penelitian terpadu terhadap usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan	Jumlah Dokumen perubahan status dan fungsi kawasan hutan	0	1 Dokumen	500	1 Dokumen	5
		Penyebarluasan informasi di bidang kehutanan	.02	16	03	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	Jumlah Pelaksanaan Pameran dan update data pembangunan kehutanan pada website	Pameran 4 Kali, Update website 12 kali	4 Pameran	145	Pameran 3 Kali, Update website 12 kali	2



						Indeks rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RHPJP	-	-	-	-	
						Indeks perluasan akses informasi dan perpetaan	-	-	-	-	
			02	16	08	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Luas inventarisasi berkala dan penataan hutan	-	-	-	-
						Panjang tingkat penataan batas luar dn batas blok pada wilayah KPHP	-	-	-	-	
						Indeks rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RHPJP	-	-	-	-	
						perluasan akses informasi dan perpetaan	-	-	-	-	
			02	16	09	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Luas inventarisasi berkala dan penataan hutan	-	-	-	-
						Panjang tingkat penataan batas luar dn batas blok pada wilayah KPHP	-	-	-	-	
						Indeks rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RHPJP	-	-	-	-	
						Indeks perluasan akses informasi dan perpetaan	-	-	-	-	
			02	16	10	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit IX Tebo barat	Luas inventarisasi berkala dan penataan hutan	-	-	-	-
						Panjang tingkat penataan batas luar dn batas blok pada wilayah KPHP	-	-	-	-	
						Indeks rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RHPJP	-	-	-	-	



						Indeks perluasan akses informasi dan perpetaan	-	-	-	-	
			02	16	11	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit X Tebo Timur	Luas inventarisasi berkala dan penataan hutan	-	-	-	-
						Panjang tingkat penataan batas luar dn batas blok pada wilayah KPHP	-	-	-	-	
						Indeks rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RHPJP	-	-	-	-	
						Indeks perluasan akses informasi dan perpetaan	-	-	-	-	
			02	16	12	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Luas inventarisasi berkala dan penataan hutan	-	-	-	-
						Panjang tingkat penataan batas luar dn batas blok pada wilayah KPHP	-	-	-	-	
						Indeks rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RHPJP	-	-	-	-	
						Indeks perluasan akses informasi dan perpetaan	-	-	-	-	
			02	16	13	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Luas inventarisasi berkala dan penataan hutan	-	-	-	-
						Panjang tingkat penataan batas luar dn batas blok pada wilayah KPHP	-	-	-	-	
						Indeks rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RHPJP	-	-	-	-	
						Indeks perluasan akses informasi dan perpetaan	-	-	-	-	



			02	16	15	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Luas inventarisasi berkala dan penataan hutan	-	-	-	-	
							Panjang tingkat penataan batas luar dn batas blok pada wilayah KPHP	-	-	-	-	
							Indeks rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RHPJP	-	-	-	-	
							Indeks perluasan akses informasi dan perpetaan	-	-	-	-	
			02	16	16	Pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Luas inventarisasi berkala dan penataan hutan	-	-	-	-	
							Panjang tingkat penataan batas luar dn batas blok pada wilayah KPHP	-	-	-	-	
							Indeks rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RHPJP	-	-	-	-	
							Indeks perluasan akses informasi dan perpetaan	-	-	-	-	
			02	16	17	Pengelolaan kawasan hutan di UPTD TAHURA	Luas inventarisasi berkala dan penataan hutan	-	-	-	-	
							Panjang tingkat penataan batas luar dn batas blok pada wilayah KPHP	-	-	-	-	
							Indeks rasionalisasi wilayah kelola dalam rangka revisi RHPJP	-	-	-	-	
							Indeks perluasan akses informasi dan perpetaan	-	-	-	-	
			02	16	18	Pengelolaan hutan kenali	Prosentase pengelolaan hutan kenali	-	-	-	-	



Jumlah Pembangunan KPHP/KPHL dan Cabang Dinas	02	15	01	Pembangunan KPHP, KPHL dan cabang Dinas	Jumlah Pembangunan KPHP dan KPHL serta Cabang Dinas	5 Unit KPHP, 1 Unit KPHL	17 Unit KPHP/HL dan 4 Cabang Dinas	400	17 Unit KPHP/HL dan 4 Cabang Dinas	3
Jumlah SDM Teknis Kehutanan					Jumlah personil pada KPHP dan KPHL yang mempunyai keahlian teknis kehutanan (Polhut, Juru ukur, PEH, Penyuluh Kehutanan, Wasganis-PHPL)	134 ASN	NA	0	53 ASN	3
Persentase masyarakat dalam mengakses kawasan hutan dengan program perhutanan berbasis masyarakat	02	15	02	Pengembangan Hutan Tanaman	Jumlah perizinan PHBM yang diterbitkan	2 HPH, 1 RE, 18 HTI, 2 HKM & HTR di 8 Kab.	2 HPH, 1 RE, 18 HTI, 2 HKM & HTR di 8 Kab.	450	10 KAB/KOTA	2
					Jumlah laporan pengawasan HPH, RE, HTR dan HKM	5 laporan	5 laporan		5 laporan	
					Jumlah Penyediaan bibit tanaman	20.000 bibit	20.000 bibit		15.000 bibit	
Jumlah fasilitasi penataan batas Hutan Desa, HTR, HKM dan Hutan Adat	02	15	03	Pengembangan Kelompok tani Usaha Kehutanan dan Pengembangan Hutan Masyarakat adat	Jumlah Kelompok Tani Hutan di Provinsi Jambi	23 Kelompok	23 Kelompok	400	23 Kelompok	4
					Jumlah lokasi PHBM yang dibentuk	3 Lokasi	3 Lokasi		3 Lokasi	
					Jumlah Hutan Adat yang difasilitasi	4 Lokasi Hutan Adat	4 Lokasi Hutan Adat		4 Lokasi Hutan Adat	
Jumlah fasilitasi penataan batas Hutan Desa, HTR, HKM dan Hutan Adat	02	15	04	Pendampingan kelompok usaha Perhutanan Sosial	Jumlah fasilitasi izin perhutanan sosial (PHBM) yang terbentuk	21 izin	3 izin	300	3 izin	2
					Jumlah laporan pembinaan dan monitoring izin perhutanan sosial		5%		5%	



		jumlah industri pengolahan hasil hutan bukan kayu	02	15	05	Pengembangan Hasil Hutan kayu dan hasil hutan Non Kayu	Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu	3 industri	1 industri	350	1 industri	2
		Jumlah Bantuan Mesin dan Peralatan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu kepada pelaku usaha kecil					Jumlah Bantuan Mesin dan Peralatan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu kepada pelaku usaha kecil	0	1 unit		1 unit	
		Meningkatnya jumlah dan variasi jenis produksi hasil hutan bukan kayu					Jumlah variasi komoditi produksi hasil hutan bukan kayu	1 jenis	1 jenis		1 jenis	
		Meningkatnya nilai ekonomi dari pemanfaatan jasa lingkungan sektor kehutanan					Jumlah obyek wisata dan pemanfaatan jasa lingkungan di Provinsi Jambi	3 objek wisata	0		1 lokasi	
		Capaian target PNPB	02	15	06	Monitoring dan Fasilitasi PNPB dan PAD sektor kehutanan	Persentase Peningkatan PSDH/DR	Rp. 20.360.435.433,-	Rp. 23.058.570.600,-	200	Rp. 23.099.280.918,-	2
		Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan sebagai sumber PAD					Share Retribusi Daerah sektor kehutanan terhadap total PAD	Rp. 6.951.585.964,27 -	Rp. 10.580.754.180,-		Rp. 12.425.665.500,-	
							Jumlah Bintek PSDH/DR yang dilaksanakan	3 kali	3 kali		3 kali	
							Persentase Capaian Peningkatan PAD	0.01%	0.05%		0.25%	
			02	15	07	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah pemegang izin yang mendapatkan sertifikat PHPL	2 perusahaan	1 perusahaan	300	1 perusahaan	3
							Jumlah Pengawasan dan Pengendalian pada pemegang IUPHHK	22 kali	18 kali		17 kali	



		02	15	08	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Jumlah sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat, pelaku usaha mengenai pemanfaatan kayu rakyat dan teknologi pengolahan hasil hutan berwawasan lingkungan	0	2 kali	31	2 kali	3
						Jumlah Industri yang dimonitoring dan dievaluasi					
		02	15	09	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Identifikasi potensi HHBK / Fasilitasi permohonan Izin HHBK	0	2 Kab/kota	300	1 Kab/Kota	2
						Jumlah Persemaian HHBK	0	1 persemaian		1 persemaian	
						Jumlah persemaian dan Penangkaran Jenis Anggrek Alam	10 Jenis	5 Jenis		5 Jenis	
						Persentase realisasi Sentra Hasil Hutan Non Kayu	0	80%		80%	
Persentase Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan		02	15	10	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Jumlah IUPHHK HT/HA dan hutan hak yang sudah mendapat sertifikasi legalitas kayu	10 IUPHHK HT/HA	5 IUPHHK HT/HA dan Hutan Hak	400	5 IUPHHK HT/HA dan Hutan Hak	3
						Jumlah IUPHHK HT/HA, IUPHHK dan hutan hak yang sudah menggunakan aplikasi online untuk penatausahaan hasil hutan kayu	60 Pemegang Ijin HT/HA, Industri dan Hutan Hak	6 Pemegang Ijin HT/HA, Industri dan Hutan Hak		6 Pemegang Ijin HT/HA, Industri dan Hutan Hak	
						Jumlah kasus peredaran hasil hutan kayu ilegal yang diselesaikan	24 Kasus	2 kasus		2 kasus	



	produksi dan nilai tambah produk kehutanan serta daya serap tenaga kerja masyarakat	02	15	11	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Jumlah sosialisasi/pe nyuluhan kepada masyarakat, pelaku usaha mengenai pemanfaatan kayu rakyat dan teknologi pengolahan hasil hutan berwawasan lingkungan	0	2 kali	400	2 kali	4
						Jumlah Bantuan Mesin dan Peralatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu kepada pemilik lahan hutan hak	0	2 unit		2 unit	
						Jumlah Industri yang dimonitoring dan dievaluasi	15 IUIPHH K	8 IUIPH HK		8 IUIPH HK	
	kinerja pemegang izin di bidang kehutanan	02	15	12	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah pemegang izin yang mendapatkan sertifikat PHPL	2 perusahaan	1 perusahaan	300	1 perusahaan	3
	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari					Jumlah Pengawasan dan Pengendalian pada pemegang IUPHHK	22 kali	18 kali		17 kali	
		02	15	14	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Jumlah wilayah yang memiliki potensi Hasil Hutan Non Kayu	0	2 Kab/kota	300	1 Kab/Kota	2
						Jumlah Persemaian HHBK	0	1 persemaian		1 persemaian	
						Jumlah persemaian dan Penangkaran Jenis Anggrek Alam	10 Jenis	5 Jenis		5 Jenis	
						Persentase realisasi Sentra Hasil Hutan Non Kayu	0	80%		80%	



			02	15	15	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit I Kerinci	Jumlah pemanfaatan hutan di wilayah tertentu	0	0%	-	0%
							Jumlah alat Ekonomi Produktif	0	0%	-	0%
							Jumlah pemantauan KPHP yang ada ijin	0	0%	-	0%
							Monitoring dan fasilitasi PNBP, PAD sektor Kehutanan	0	0%	-	0%
							Jumlah pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan	0	0%	-	0%
							Fasilitasi kerja sama dan Kemitraan	0	0%	-	0%
			02	15	16	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit II dan III Bungo	Jumlah pemanfaatan hutan di wilayah tertentu	0	0%	-	0%
							Jumlah alat Ekonomi Produktif	0	0%	-	0%
							Jumlah pemantauan KPHP yang ada ijin	0	0%	-	0%
							Monitoring dan fasilitasi PNBP, PAD sektor Kehutanan	0	0%	-	0%
							Jumlah pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan	0	0%	-	0%
							Fasilitasi kerja sama dan Kemitraan	0	0%	-	0%
			02	15	17	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Jumlah pemanfaatan hutan di wilayah tertentu	0	0%	-	0%
							Jumlah alat Ekonomi Produktif	0	0%	-	0%
							Jumlah pemantauan KPHP yang ada ijin	0	0%	-	0%



						Monitoring dan fasilitasi PNBP, PAD sektor Kehutanan	0	0%	-	0%		
						Jumlah pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan	0	0%	-	0%		
						Fasilitasi kerja sama dan Kemitraan	0	0%	-	0%		
			02	15	18	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Jumlah pemanfaatan hutan di wilayah tertentu	0	0%	-	0%	
					Jumlah alat Ekonomi Produktif		0	0%	-	0%		
					Jumlah pemantauan KPHP yang ada ijin		0	0%	-	0%		
					Monitoring dan fasilitasi PNBP, PAD sektor Kehutanan		0	0%	-	0%		
					Jumlah pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan		0	0%	-	0%		
					Fasilitasi kerja sama dan Kemitraan		0	0%	-	0%		
			02	15	19		Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Jumlah pemanfaatan hutan di wilayah tertentu	0	0%	-	0%
					Jumlah alat Ekonomi Produktif			0	0%	-	0%	
					Jumlah pemantauan KPHP yang ada ijin			0	0%	-	0%	
					Monitoring dan fasilitasi PNBP, PAD sektor Kehutanan	0		0%	-	0%		



						Jumlah pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan	0	0%	-	0%	
						Fasilitasi kerja sama dan Kemitraan	0	0%	-	0%	
			02	15	20	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Jumlah pemanfaatan hutan di wilayah tertentu	0	0%	-	0%
						Jumlah alat Ekonomi Produktif	0	0%	-	0%	
						Jumlah pemantauan KPHP yang ada ijin	0	0%	-	0%	
						Monitoring dan fasilitasi PNBP, PAD sektor Kehutanan	0	0%	-	0%	
						Jumlah pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan	0	0%	-	0%	
						Fasilitasi kerja sama dan Kemitraan	0	0%	-	0%	
			02	15	21	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat	Jumlah pemanfaatan hutan di wilayah tertentu	0	0%	-	0%
						Jumlah alat Ekonomi Produktif	0	0%	-	0%	
						Jumlah pemantauan KPHP yang ada ijin	0	0%	-	0%	
						Monitoring dan fasilitasi PNBP, PAD sektor Kehutanan	0	0%	-	0%	
						Jumlah pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan	0	0%	-	0%	
						Fasilitasi kerja sama dan Kemitraan	0	0%	-	0%	



			02	15	23	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit X Tebo Timur	Jumlah pemanfaatan hutan di wilayah tertentu	0	0%	-	0%
							Jumlah alat Ekonomi Produktif	0	0%	-	0%
							Jumlah pemantauan KPHP yang ada ijin	0	0%	-	0%
							Monitoring dan fasilitasi PNBP, PAD sektor Kehutanan	0	0%	-	0%
							Jumlah pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan	0	0%	-	0%
							Fasilitasi kerja sama dan Kemitraan	0	0%	-	0%
			02	15	24	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Jumlah pemanfaatan hutan di wilayah tertentu	0	0%	-	0%
							Jumlah alat Ekonomi Produktif	0	0%	-	0%
							Jumlah pemantauan KPHP yang ada ijin	0	0%	-	0%
							Monitoring dan fasilitasi PNBP, PAD sektor Kehutanan	0	0%	-	0%
							Jumlah pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan	0	0%	-	0%
							Fasilitasi kerja sama dan Kemitraan	0	0%	-	0%
			02	15	25	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Jumlah pemanfaatan hutan di wilayah tertentu	0	0%	-	0%
							Jumlah alat Ekonomi Produktif	0	0%	-	0%
							Jumlah pemantauan KPHP yang ada ijin	0	0%	-	0%
							Monitoring dan fasilitasi PNBP, PAD sektor	0	0%	-	0%



							Kehutanan					
							Jumlah pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan	0	0%	-	0%	
							Fasilitasi kerja sama dan Kemitraan	0	0%	-	0%	
			02	15	26	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Jumlah pemanfaatan hutan di wilayah tertentu	0	0%	-	0%	
							Jumlah alat Ekonomi Produktif	0	0%	-	0%	
							Jumlah pemantauan KPHP yang ada ijin	0	0%	-	0%	
							Monitoring dan fasilitasi PNBP, PAD sektor Kehutanan	0	0%	-	0%	
							Jumlah pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan	0	0%	-	0%	
							Fasilitasi kerja sama dan Kemitraan	0	0%	-	0%	
			02	15	27	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Jumlah pemanfaatan hutan di wilayah tertentu	0	0%	-	0%	
							Jumlah alat Ekonomi Produktif	0	0%	-	0%	
							Jumlah pemantauan KPHP yang ada ijin	0	0%	-	0%	
							Monitoring dan fasilitasi PNBP, PAD sektor Kehutanan	0	0%	-	0%	
							Jumlah pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan	0	0%	-	0%	



						Fasilitasi kerja sama dan Kemitraan	0	0%	-	0%		
			02	15	28	Pemanfaatan dan pengembangan potensi Hasil Hutan di UPTD TAHURA	Jumlah pemanfaatan hutan di wilayah tertentu	0	0%	-	0%	
						Jumlah alat Ekonomi Produktif	0	0%	-	0%		
						Jumlah pemantauan KPHP yang ada ijin	0	0%	-	0%		
						Monitoring dan fasilitasi PNBP, PAD sektor Kehutanan	0	0%	-	0%		
						Jumlah pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan	0	0%	-	0%		
						Fasilitasi kerja sama dan Kemitraan	0	0%	-	0%		
	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	02	16		Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan	Presentase penurunan kawasan hutan dan lahan terbakar	5.542 Ha	5%	950	5%	3.7
		Jumlah Pelaksanaan patroli dan ground check dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan	02	16	01	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Pelaksanaan Patroli dan Ground Chek dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	10 kali	5
		Jumlah Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan					Jumlah Sosialisasi Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	10 kali	10



		Jumlah pelaksanaan pembentukan dan Bimbingan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada pemegang izin dan masyarakat peduli api (MPA)	02	16	02	Pembentukan/ Pembinaan Masyarakat Sadar Api (MPA)	Jumlah pelaksanaan pembentukan dan Bimbingan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada pemegang izin dan masyarakat peduli api (MPA)	0 Kali	0 Kali	0	17 Kali	2
		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi kebakaran hutan dan lahan	02	16	03	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi kebakaran hutan dan lahan	12 Kali	15 Kali	30	50 Kali	1
						Jumlah Rapat Koordinasi		3 Kali	3 Kali	-	2 kali	1
		Jumlah Monitoring Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana kebakaran	02	16	04	Monitoring Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana kebakaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Saprasi Kebakaran pada Perusahaan	11 Kali	11 Kali	30	17 Kali	3
		Jumlah Pembentukan Kelompok MPA yang dilatih	02	16	05	Pelatihan keteknikan untuk menunjang PLTB	Jumlah Pembentukan Kelompok MPA	0 Kali	0 Kali	0	17 Kelompok	2
		Jumlah Pengadaan alat pemadam kebakaran	02	16	06	Sarana dan Prasarana kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Pengadaan alat pemadam kebakaran	0 Unit	0 Unit	0	10 Unit	1,0
						Pemadaman kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan operasional pemadaman hutan dan lahan	10 kali	10 kali	200	10 kali	2
		Mendata areal bekas kebakaran di Provinsi Jambi	02	16	07	Monev Bekas kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Monev kegiatan kebakaran hutan dan lahan	10 kali	10 kali	200	10 kali	2
		Persentase pelaksanaan patroli, operasi Pengamanan hutan dan Peredaran hasil hutan	02	16	08	18.Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	Jumlah Pelaksanaan Operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	23 Kali	15 Kali	150	15 Kali	4



		Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan pengamanan hutan					Jumlah Rapat dan Koordinasi pengamanan hutan	31 Kali	7 Kali	35	12 Kali	5
		Persentase pelaksanaan patroli pengamanan batas kawasan hutan	02	16	09	Pengamanan batas kawasan hutan dan kawasan Hutan	Jumlah Patroli dalam Pengamanan batas kawasan Hutan	0	11 Kali	200	17 Kali	1
		Persentase pelaksanaan patroli, operasi, penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan	02	16	10	Koordinasi penegakan hukum dalam rangka Pemanggilan saksi/tersangka/ahli serta Pengurusan ijin sita Pengadilan Kab/Kota	Jumlah Koordinasi dalam proses penegakan hukum kehutanan	0	5 Kali	20	20 Kali	2
			02	16	11	Bimbingan teknis penggunaan Senjata Api	jumlah Pelaksanaan Pelatihan Menembak bagi anggota POLHUT	0	-	-	1 Kali	5
							Jumlah Pengawasan dan Penggunaan senjata api serta Pembelian peluru senjata api Cezka dan PMI A1	2 Kali	5 Kali	10	17 Kali	1
			02	17	12	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	Jumlah Apresiasi kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	18 Kali	6 Kali	50	17 Kali	1
		Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap Konflik batas kawasan Hutan	02	17	13	Pemantapan Kawasan Hutan	Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi tata batas kawasan hutan untuk terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	100	22 Kecamatan	6



						Jarak orientasi Batas kawasan hutan untuk terhimpunnya data kondisi pal batas dan rintis batas	0	-	-	185 KM	1	
						Jarak rekonstruksi Batas kawasan hutan sesuai dengan posisi berita acara tata batas	0	-	-	-		
						Jarak Pemeliharaan rintis batas dan Pal batas kawasan hutan	13 KM	-	-	-	-	
		Persentase IPPKH yang mengelola kawasan hutan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	02	17	14	Evaluasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Jambi	Jumlah IPPKH yang telah dievaluasi	33 iin	8 ijin	100	9 ijin	1
		Jumlah Penanganan Konflik yang diselesaikan	02	17	15	Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan	Jumlah Penanganan Konflik yang diselesaikan	1 Konflik	4 Konflik di 9 Kab.	200	8 Konflik di 9 Kabupaten	4
		Mengidentifikasi konservasi keanekaragaman hayati	02	17	16	Konservasi kawasan esensial (bernilai ekosistem penting) dan keanekaragaman hayati	Jumlah Identifikasi kawasan esensial di Provinsi Jambi	-	-	-	-	
		Menurunnya kerusakan hutan	02	17	17	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan KPH Kerinci dan sungai Penuh	Jumlah Penyuluhan terhadap Masyarakat	-	-	-	-	
			02	17	18	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan KPH Merangin	Jumlah Penyuluhan terhadap Masyarakat	-	-	-	-	



			02	17	19	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan KPH Limau Sarolangun	Jumlah Penyuluhan terhadap Masyarakat	-	-	-	-	
			02	17	20	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan KPH Hilir Sarolangun	Jumlah Penyuluhan terhadap Masyarakat	-	-	-	-	
			02	17	21	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan KPH Bungo	Jumlah Penyuluhan terhadap Masyarakat	-	-	-	-	
			02	17	22	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan KPH Tebo Barat	Jumlah Penyuluhan terhadap Masyarakat	-	-	-	-	
			02	17	23	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan KPH Tebo Timur	Jumlah Penyuluhan terhadap Masyarakat	-	-	-	-	
			02	17	24	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan KPH Batanghari	Jumlah Penyuluhan terhadap Masyarakat	-	-	-	-	
			02	17	25	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan KPH Muaro Jambi dan Kota Jambi	Jumlah Penyuluhan terhadap Masyarakat	-	-	-	-	



			02	17	26	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan KPH Tanjung Jabung Timur	Jumlah Penyuluhan terhadap Masyarakat	-	-	-	-	
			02	17	27	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan KPH Tanjung Jabung Barat	Jumlah Penyuluhan terhadap Masyarakat	-	-	-	-	
			02	17	28	Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit I Kerinci	Patroli Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Provinsi Jambi	-	-	-	-	-
						Patroli Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	-	-			-	
						Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-	-			-	
						Jumlah Fasilitasi Penyuluh	-	-			-	
						Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	-	-			-	
						Jumlah Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan	-	-			-	
			02	17	29	Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit II dan III Bungo	Patroli Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Provinsi Jambi	-	-	-	-	-



							Patroli Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	-	-		-
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-	-		-
							Jumlah Fasilitasi Penyuluh	-	-		-
							Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	-	-		-
							Jumlah Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan	-	-		-
			02	17	30	Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Patroli Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Provinsi Jambi	-	-	-	-
							Patroli Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	-	-		-
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-	-		-
							Jumlah Fasilitasi Penyuluh	-	-		-
							Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	-	-		-
							Jumlah Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan	-	-		-



			02	17	31	Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Patroli Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Provinsi Jambi	-	-	-	-	-
							Patroli Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	-	-			-
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-	-			-
							Jumlah Fasilitasi Penyuluh	-	-			-
							Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	-	-			-
							Jumlah Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan	-	-			-
			02	17	32	Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Patroli Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Provinsi Jambi	-	-	-	-	-
							Patroli Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	-	-			-
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-	-			-
							Jumlah Fasilitasi Penyuluh	-	-			-
							Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	-	-			-



						Jumlah Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan	-	-		-		
			02	17	33	Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat	Patroli Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Provinsi Jambi	-	-	-	-	-
						Patroli Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	-	-		-		
						Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-	-		-		
						Jumlah Fasilitasi Penyuluh	-	-		-		
						Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	-	-		-		
						Jumlah Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan	-	-		-		
			02	17	34	Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit X Tebo Timur	Patroli Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Provinsi Jambi	-	-	-	-	-
						Patroli Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	-	-		-		
						Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-	-		-		



						Jumlah Fasilitasi Penyuluh	-	-		-		
						Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	-	-		-		
						Jumlah Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan	-	-		-		
			02	17	35	Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Patroli Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Provinsi Jambi	-	-	-	-	-
						Patroli Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	-	-		-		
						Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-	-		-		
						Jumlah Fasilitasi Penyuluh	-	-		-		
						Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	-	-		-		
						Jumlah Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan	-	-		-		
			02	17	36	Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Patroli Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Provinsi Jambi	-	-	-	-	-



						Patroli Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	-	-		-
						Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-	-		-
						Jumlah Fasilitasi Penyuluh	-	-		-
						Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	-	-		-
						Jumlah Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan	-	-		-
			02	17	37	Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-
						Patroli Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	-	-		-
						Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-	-		-
						Jumlah Fasilitasi Penyuluh	-	-		-
						Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	-	-		-
						Jumlah Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan	-	-		-



			02	17	38	Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Patroli Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Provinsi Jambi	-	-	-	-	-
							Patroli Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	-	-			-
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-	-			-
							Jumlah Fasilitasi Penyuluh	-	-			-
							Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	-	-			-
							Jumlah Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan	-	-			-
			02	17	39	Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD TAHURA	Patroli Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Provinsi Jambi	-	-	-	-	-
							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-	-			-
							Jumlah Fasilitasi Penyuluh	-	-			-
							Jumlah Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	-	-			-



						Jumlah Fasilitas Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan	-	-		-	
	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis	02	18		Program : Rehabilitasi Hutan dan Lahan	844.647 Ha	0%	960	0.1%	6,5
		Jumlah pemegang izin yang melakukan reklamasi dan RHL	02	18	01	Koordinasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan	0	0	0	11 Kab/kota	1
		Jumlah penangkar benih dan bibit bersertifikat	02	18	02	Pengembangan bibit / benih tanaman kehutanan	0	0	-	10.000 batang per lokasi	2
		Persentase pelaksanaan reklamasi dan RHL pada kawasan hutan	02	18	03	Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata	0	-	-	4 KPH dan 11 Kab/kota	4
			02	18	04	Pelaksanaan Penanaman pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Muaro Jambi dan Kota Jambi	0	-	-	0%	
			02	18	05	Pelaksanaan Penanaman pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Batanghari	0	-	-	0	
			02	18	06	Pelaksanaan Penanaman pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Tanjung Jabung Timur	0	-	-	0	
			02	18	07	Pelaksanaan Penanaman pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di	0	-	-	10%	6



			KPH Kerinci dan Kota Sungai Penuh	dan Kota Sungai Penuh						
02	18	08	Pelaksanaan Penanaman pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Tanjung Jabung Barat	Persentase realisasi pelaksanaan Penanaman pohon pada KPH Tanjungbar	0	-	-	10%	6	
02	18	09	Pelaksanaan Penanaman pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Limau hulu Sarolangun	Persentase realisasi pelaksanaan Penanaman pohon pada KPH Unit VII Limau Sarolangun	0	-	-	10%	6	
02	18	10	Pelaksanaan Penanaman pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH hilir Sarolangun	Persentase realisasi pelaksanaan Penanaman pohon pada KPH VIII Hilir Pauh Sarolangun	0	-	-	0		
02	18	11	Pelaksanaan Penanaman pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Tebo Barat	Persentase realisasi pelaksanaan Penanaman pohon pada KPH Tebo Barat	0	-	-	0		
02	18	12	Pelaksanaan Penanaman pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Tebo Timur	Persentase realisasi pelaksanaan Penanaman pohon pada KPH Tebo Timur	0	-	-	0		
02	18	13	Pelaksanaan Penanaman pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Bungo	Persentase realisasi pelaksanaan Penanaman pohon pada KPH Bungo	0	-	-	0%		
02	18	14	Pelaksanaan Penanaman pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Merangin	Persentase realisasi pelaksanaan Penanaman pohon pada KPH Merangin	0	-	-	0		
02	18	15	Pelaksanaan Penanaman pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di UPTD TAHURA	Persentase realisasi pelaksanaan Penanaman pohon pada TAHURA	0	-	-	0		



		Persentase kawasan hutan yang terpelihara	02	18	16	Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata provinsi Jambi	luas THK dan KRBS yang di pelihara	10 Ha THK, 435 Ha KRBS	10 Ha THK, 435 Ha KRBS	360	10 Ha THK, 435 Ha KRBS	4,3
							Jumlah unit Fasilitas rekreasi dan Pendidikan di THK	-	4 unit	250	8 Unit	6
							Jenis Bibit Tanaman Kehutanan yang Berkualitas (sertifikat) dan Koleksi Tumbuhan Dataran Rendah Sumatera	bibit yang berkualitas	bibit yang berkualitas		bibit yang berkualitas	
			02	18	17	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan Lahan	Luas pemeliharaan arboretum dan tanaman unggulan lokal dan Hutan Adat	22 Ha	22 Ha	350	22 Ha	3
			02	18	18	Monitoring pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah dokumen DAS	-	-	-	-	
			02	18	19	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di UPTD TAHURA	Prosentase luas pelaksanaan penanaman	-	-		-	
							Prosentase luas pemeliharaan tanaman	-	-		-	
		Prosentase penurunan lahan kritis 0,1 %	02	18	20	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit I Kerinci	Jumlah bibit yang siap tanam	-	-		-	
							Luas penanaman pohon di luar kawasan hutan	-	-		-	
							Luas pemeliharaan tanaman	-	-		-	
			02	18	21	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit II dan III Bungo	Jumlah bibit yang siap tanam	-	-		-	
							Luas penanaman pohon di luar kawasan hutan	-	-		-	
							Luas pemeliharaan tanaman	-	-		-	
			02	18	22	Peningkatan peran serta masyarakat	Jumlah bibit yang siap tanam	-	-		-	



					dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit IV,V dan VI Merangin	Luas penanaman pohon di luar kawasan hutan	-	-	-
						Luas pemeliharaan tanaman	-	-	-
			02	18	23	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Jumlah bibit yang siap tanam	-	-
						Luas penanaman pohon di luar kawasan hutan	-	-	-
						Luas pemeliharaan tanaman	-	-	-
			02	18	24	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit VII Hilir Sarolangun	Jumlah bibit yang siap tanam	-	-
						Luas penanaman pohon di luar kawasan hutan	-	-	-
						Luas pemeliharaan tanaman	-	-	-
			02	18	25	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit IX Tebo Barat	Jumlah bibit yang siap tanam	-	-
						Luas penanaman pohon di luar kawasan hutan	-	-	-
						Luas pemeliharaan tanaman	-	-	-
			02	18	26	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit X Tebo Timur	Jumlah bibit yang siap tanam	-	-
						Luas penanaman pohon di dalam kawasan hutan	-	-	-
						Luas pemeliharaan tanaman	-	-	-
			02	18	27	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi	Jumlah bibit yang siap tanam	-	-



					hutan dan lahan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Luas penanaman pohon di luar kawasan hutan	-	-	-					
						Luas pemeliharaan tanaman	-	-	-					
	02	18	28		Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Jumlah bibit yang siap tanam	-	-	-					
						Luas penanaman pohon di dalam kawasan hutan	-	-	-					
						Luas pemeliharaan tanaman	-	-	-					
	02	18	29		Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit XIV tanjung Jabung Timur	Jumlah bibit yang siap tanam	-	-	-					
						Luas penanaman pohon di luar kawasan hutan	-	-	-					
						Luas pemeliharaan tanaman	-	-	-					
	02	18	30		Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Jumlah bibit yang siap tanam	-	-	-					
						Luas penanaman pohon di luar kawasan hutan	-	-	-					
						Luas pemeliharaan tanaman	-	-	-					
				Prosentase penurunan lahan kritis 0,1 %	02	18	31	Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit I Kerinci	Luas penanaman pohon di dalam kawasan hutan	-	-	-	-	
					02	18	32	Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit II dan III Bungo	Luas penanaman pohon di luar kawasan hutan	-	-	-	-	
					02	18	33	Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin	Luas penanaman pohon di dalam kawasan hutan	-	-	-	-	
					02	18	34	Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Luas penanaman pohon di dalam kawasan hutan	-	-	-	-	



			02	18	35	Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Luas penanaman pohon di dalam kawasan hutan	-	-	-	-	
			02	18	36	Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat	Luas penanaman pohon di dalam kawasan hutan	-	-	-	-	
			02	18	37	Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit X Tebo Timur	Luas penanaman pohon di dalam kawasan hutan	-	-	-	-	
			02	18	38	Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari	Luas penanaman pohon di dalam kawasan hutan	-	-	-	-	
			02	18	39	Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi	Luas penanaman pohon di dalam kawasan hutan	-	-	-	-	
			02	18	40	Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	Luas penanaman pohon di dalam kawasan hutan	-	-	-	-	
			02	18	41	Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	Luas penanaman pohon di dalam kawasan hutan	-	-	-	-	
			02	18	42	Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD Tahura	Luas penanaman pohon di dalam kawasan hutan	-	-	-	-	
			02	18	43	Pemeliharaan tanaman pada kawasan hutan di KPHP Unit I Kerinci	Luas pemeliharaan tanaman di dalam kawasan hutan	-	-	-	-	
			02	18	44	Pemeliharaan tanaman pada kawasan hutan di KPHP Unit II dan III Bungo	Luas pemeliharaan tanaman di dalam kawasan hutan	-	-	-	-	
			02	18	45	Pemeliharaan tanaman pada kawasan hutan di KPHP Unit IV, V dan VI	Luas pemeliharaan tanaman di dalam kawasan hutan	-	-	-	-	



		Meningkatnya pelaksanaan kegiatan di KPHP	02	18	31	Peningkatan pengelolaan KPH, TAHURA, Hutan Kota, Hutan Rakyat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	-	-	-	-
--	--	---	----	----	----	--	-----------------------------------	---	---	---	---

**BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Sasaran			
			2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Presentase pengelolaan hutan yang lestari	33 %	-	-	43%	
2.	Presentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	5.542 Ha	5 %	5 %	5 %	
3.	Persentase penurunan lahan kritis	844.647 Ha	0 %	0.1 %	0.1 %	

BAB VII



PENUTUP

Rencana Strtaegis Revisi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, stategi, kebijakan, program dan arah pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan memperhitungkan potensi(kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang di revisi dikarenakan adanya Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.. Dan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016 – 2021. Sehingga menjadi arah dan pedoman dalam pengusulan kegiatan setiap tahunnya. RENSTRA diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan dan merupakan awal dari proses akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Keberhasilan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi **”Terwujudnya Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera menuju Jambi TUNTAS 2021”** akan sangat perlu didukung oleh komitmen yang kuat dari segala sektor, konsistensi dalam kebijakan dan implementasi serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif sehingga pada akhirnya visi Jambi TUNTAS Tahun 2021 dapat tercapai.

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 Revisi nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja SKPD dan mengacu pada RKPD.

Jambi, 2018

Plt. KEPALA DINAS,

Ir. Erizal

Pembina Tk.I

NIP. 196009291989031007



"GAGAL DALAM MERENCANAKAN ADALAH MERENCANAKAN
KEGAGALAN"

"RENCANA YANG PALING BAIK ADALAH RENCANA YANG
ALLAH SWT TENTUKAN UNTUK HAMBANYA"



DAN BERENCANALAH KALIAN, ALLAH
MEMBUAT RENCANA,
DAN ALLAH SEBAIK- BAIK PERENCANA
(ALI IMRAN 54)